

BAB V

KESIMPULAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini di mana Perang Dingin telah berakhir sejak 1991, hubungan konfrontatif antara Amerika Serikat dan Rusia ternyata masih saja terjadi. Adalah Krisis di Ukraina, yang sejauh ini menjadi titik terparah dalam dinamika hubungan Amerika Serikat dengan Rusia pasca Perang Dingin. Timbulnya ketegangan yang digambarkan dengan aksi saling berbalas sanksi oleh Amerika Serikat dan Rusia, serta penggunaan instrumen militer sebagai strategi *deterrence*, menghidupkan kembali memori tentang persaingan antara kedua negara tersebut seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Krisis Ukraina bisa saja menjadi sumbu ledak bagi lahirnya *The New Cold War* atau Perang Dingin baru antara dua mantan seteru yang pernah bertikai dalam struktur bipolar di masa lampau itu.

Sebelum pecahnya krisis di Ukraina, hubungan Amerika Serikat dengan Rusia pasca Perang Dingin memang telah mengalami pasang surut. Karakteristik dari masing-masing politik luar negeri Amerika Serikat dan Rusia yang memang berbeda menjadikan hubungan kedua negara ini berjalan cukup dinamis pasca Perang Dingin. Amerika Serikat dengan karakteristik politik luar negerinya yakni penyebaran demokrasi, penjagaan keamanan, serta kesejahteraan ekonomi, berhubungan dengan Rusia yang memiliki karakteristik politik luar negeri yang begitu mengutamakan peran negaranya dalam tatanan global, serta keinginan untuk menjaga dunia agar

tetap berstruktur multipolar dengan menolak pengakuan atas superioritas Amerika Serikat di dunia. Dengan karakteristik yang demikian itu, kedua negara ini kadang dapat berjalan beriringan dalam hubungan kerjasama, namun juga kadang berhadapan satu sama lain dalam hubungan konfrontatif.

Dinamika hubungan Amerika Serikat dengan Rusia tersebut berjalan seiring dengan silih bergantinya pemerintahan yang memegang tampuk kekuasaan di Amerika Serikat. Masing-masing dari pemerintahan tersebut memiliki karakteristik kebijakan yang berbeda pula sehingga melahirkan dinamika dalam setiap kebijakannya terkait dengan hubungan AS dengan Rusia. Dengan demikian masing-masing pemerintahan tersebut turut memberikan warna tersendiri dalam dinamika hubungan AS dan Rusia pasca Perang Dingin.

Pada masa pemerintahan Bill Clinton dari Partai Demokrat yang menjabat sebagai Presiden AS pertama pasca Perang Dingin, hubungan Amerika Serikat dengan Rusia secara garis besar berjalan cukup baik. Karakteristik kepemimpinan presiden dari Partai Demokrat yang lebih menekankan kebijakan ekonomi membuat Washington dan Moskow dapat berjalan beriringan. Hal ini dicirikan dengan bergabungnya Rusia ke dalam G-7 atas rekomendasi Bill Clinton. Selain itu, kemajuan juga ditandai dengan ratifikasi AS dan Rusia terhadap perjanjian *Intermediate – Range Nuclear Force (INF)* dan *Strategic Arms Reduction Talks (START)*.

Pada masa pemerintahan George W. Bush, presiden yang terpilih dari Partai Republik, hubungan Amerika Serikat dengan Rusia secara umum mengalami kemunduran. Sikap agresif dan militeristik ala Partai Republik membuat hubungan Washington dan Moskow secara dramatis mulai memanas. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan Bush untuk menarik AS keluar dari perjanjian *Antibalistic Missile* (ABM) yang membuat Rusia membalas dengan mengancam untuk membatalkan perjanjian *Strategic Offensive Treaty* (SORT) dan START II. Ketegangan juga ditunjukkan dengan agresifnya ekspansi NATO di Eropa Timur yang disponsori oleh AS dengan berhasil menarik tiga negara Baltik bekas Uni Soviet serta tiga negara Eropa Timur bekas anggota Pakta Warsawa untuk menjadi anggota NATO. Selain itu, program penempatan sistem anti rudal AS yang digagas oleh Bush, serta konflik Georgia-Rusia di mana Amerika Serikat secara terang-terangan mendukung Georgia, juga melahirkan ketegangan hebat antara Amerika Serikat dan Rusia pada masa pemerintahan George W. Bush.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Barack Obama, Presiden dari Partai Demokrat, hubungan Amerika Serikat dengan Rusia kembali mengalami kemajuan. Presiden dari Partai Demokrat lagi-lagi menunjukkan kecenderungan yang sangat besar terhadap kebijakan non militer seperti kebijakan ekonomi dan pemulihan reputasi AS di dunia internasional. Kebijakan Obama yang demikian itu salah satunya terlihat dari keputusannya meninjau kembali program penempatan sistem anti rudal di Eropa Timur yang digagas oleh Bush pada masa awal jabatannya. Hal inilah yang

kemudian membuat hubungan AS dengan Rusia kembali membaik yang ditandai dengan adanya *Reset Relation* yang secara simbolis menunjukkan keinginan Amerika Serikat untuk memulihkan hubungannya dengan Rusia.

Hubungan Amerika Serikat dan Rusia yang telah membaik di masa pemerintahan Barack Obama ternyata kembali memanas setelah pecahnya Krisis Ukraina. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sikap Amerika Serikat dengan Rusia dalam penyelesaian krisis di negara tersebut. Amerika Serikat mendukung kubu oposisi untuk menggulingkan pemerintahan Viktor Yanukovich yang sedang berkuasa, sedangkan Rusia berusaha untuk mendukung rezim pemerintahan tersebut untuk tetap berkuasa di Ukraina. Amerika Serikat memberikan dukungan yang besar berupa dukungan moral, pengamanan, hingga bantuan dana kepada oposisi Ukraina agar dapat menguasai pemerintahan. Hal tersebut membuat Rusia yang tidak ingin kehilangan pengaruh di perbatasannya itu bergerak agresif dengan mengirimkan pasukan militernya ke bagian timur Ukraina. Pergerakan agresif Rusia ini bahkan berujung pada pencaplokan semenanjung Crimea yang menjadikan wilayah itu kini berada dalam wilayah kekuasaan Rusia. Selain itu, Rusia juga diyakini memberikan dukungan kepada kelompok separatis bersenjata pro-Rusia yang melawan pemerintahan bentukan kubu oposisi. Atas tindakan Rusia tersebut AS kemudian memberlakukan sanksi untuk memukul perekonomian Rusia yang pada akhirnya membawa hubungan Washington dan Moskow ke titik terendah pasca Perang Dingin.

Dengan menggunakan konsep politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional sebagai kerangka berfikir, penulis dalam penelitian ini menemukan bahwa Amerika Serikat memiliki tiga alasan atas politik luar negerinya mendukung kubu oposisi Ukraina. Alasan yang pertama yakni tujuan ekspansi AS di Eropa Timur untuk menambah titik *sphere of influence*. Dalam hal ini, pengaruh Ukraina yang besar dalam GUAM memegang peranan penting karena integrasi Ukraina ke dalam pengaruh Barat akan diikuti oleh negara anggota GUAM lainnya seperti Moldova dan Georgia yang juga mengusahakan integrasi dengan Barat. Dengan demikian, AS tidak hanya mendapatkan Ukraina sebagai titik penyebaran pengaruhnya melainkan juga disertai oleh Georgia dan Moldova untuk kemudian menjadi negara Eropa Timur yang pro-AS.

Alasan yang kedua adalah tujuan ekspansi AS untuk memperkuat militer NATO dengan memanfaatkan nilai urgensi dari posisi geografis Ukraina sebagai *buffer zone*, dan akses istimewa yang dimiliki Ukraina di Laut Hitam. Posisi Ukraina sebagai *buffer zone* antara Barat dan Rusia dapat memungkinkan AS untuk menempatkan kekuatan NATO tepat di perbatasan Rusia sehingga dapat mengurangi potensi ancaman dari negara tersebut sekaligus dapat memperkecil kekuatan militer Kremlin di Eropa Timur. Sementara itu, akses Istimewa Ukraina di Laut Hitam dengan besarnya zona laut dan panjangnya garis pantai dapat memberikan keleluasaan bagi NATO untuk melakukan pergerakan dalam rangka mengontrol keamanan di wilayah itu. Selain itu, di Laut Hitam Ukraina juga memiliki Sevastopol

yang merupakan satu-satunya pelabuhan Rusia yang tidak membeku di musim dingin, serta sebagai satu-satunya pelabuhan Rusia yang cukup mumpuni untuk menampung Armada Laut Hitamnya. Dengan demikian, integrasi Ukraina ke dalam pengaruh Barat akan memberikan keleluasaan bagi AS untuk mengembangkan kekuatan militernya di perbatasan Rusia dan Laut Hitam melalui NATO serta di saat yang bersamaan dapat memperkecil kekuatan pengaruh militer Rusia di wilayah Eropa Timur.

Alasan yang ketiga dari dukungan Amerika Serikat terhadap kubu oposisi Ukraina adalah politik jalur pipa gas Eropa. Ukraina sebagai jalur transit terbesar bagi perdagangan gas Rusia memiliki peran yang sangat penting baik secara ekonomi maupun politik untuk menjaga keberlangsungan energi bagi Uni Eropa sekaligus mencegah Rusia menggunakan gas sebagai senjata politik untuk menekan Barat. Besarnya jumlah gas Rusia yang disalurkan melalui Ukraina, serta ketergantungan Rusia terhadap perdagangan gas itu sendiri, membuat Ukraina memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi dalam perdagangan energi Eropa. Dengan menjadikan Ukraina sebagai titik *sphere of influence* AS, maka Washington akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan ekspor gas Rusia ke Uni Eropa di mana Rusia sangat membutuhkan Ukraina sebagai jalur transit terbesar bagi ekspor gasnya. Selain itu, ketergantungan Rusia yang besar terhadap perdagangan energi sebagai sumber pendapatannya, akan membuat Kremlin tidak lagi dapat dengan mudah menggunakan isu energi untuk meningkatkan kekuatan politiknya terhadap Barat.

Ketiga alasan yang ditemukan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan yang sangat besar di Ukraina. Untuk mencapai tujuan tersebut Amerika Serikat bahkan rela mengorbankan hubungannya dengan Rusia hingga kembali melahirkan ketegangan dalam dinamika hubungannya dengan Rusia. Ketegangan yang kali ini lahir dari perbedaan sikap AS dan Rusia dalam krisis Ukraina begitu menyita perhatian masyarakat internasional karena hal yang seperti ini belum pernah terjadi lagi sejak berakhirnya perang dingin.

Saran yang ingin diajukan penulis untuk melanjutkan, memperbaharui, atau menyempurnakan penelitian ini adalah untuk melanjutkan penelitian tentang dinamika hubungan AS dengan Rusia terkait kemungkinan terjadinya Perang Dingin Baru antara kedua negara tersebut. Hal ini di dasari oleh latar belakang sejarah hubungan konfrontatif Amerika Serikat dengan Rusia, serta tingginya tingkat ketegangan yang kini ditunjukkan oleh kedua negara tersebut dalam krisis Ukraina. Pertanyaan yang sering muncul atas keadaan ini adalah, “apakah dunia sekarang sedang menghadapi Perang Dingin Baru?”.

Jika melihat doktrin militer Rusia yang menempatkan AS dan NATO sebagai ancaman utama bagi keamanannya, serta adanya opsi penggunaan senjata nuklir oleh Rusia untuk melawan ancaman tersebut, ditambah dengan kenyataan bahwa Amerika Serikat telah menyetujui anggaran 1 triliun dolar AS untuk memodernisasi senjata

nuklirnya,¹ maka dapat dikatakan bahwa persaingan nuklir antara AS dan Rusia masih berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian muncul pertanyaan yang bahkan yang lebih menarik dan berani untuk diteliti dalam penelitian selanjutnya. “apakah Perang Dingin sebenarnya pernah benar-benar berakhir?”.

Dua pertanyaan tentang pola hubungan Amerika Serikat dengan Rusia Pasca Perang Dingin dan prospeknya di masa depan tersebut sangat menarik dan bermanfaat untuk diteliti oleh penstudi ilmu hubungan internasional. Hal ini dikarenakan gejala-gejala yang ditunjukkan dalam dinamika hubungan kedua negara ini seperti hubungan kerjasama dan konfrontasi, sangat erat kaitannya dengan kajian diplomasi, resolusi konflik, strategi keamanan, serta ekonomi politik, yang kita pelajari dalam ilmu hubungan internasional. Oleh karena itu, dengan mengambil tema tersebut diharapkan agar kita dapat mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari untuk mempelajari, menganalisa, dan menjelaskan, dan mengetahui lebih jauh lagi tentang bagaimana fenomena dari hubungan Amerika Serikat dengan Rusia, serta bagaimana prospeknya di masa depan.

¹ Stephen Cohen, *'NATO Games In Ukraine Push World 5 Minutes Before Nuclear Midnight'*, Russia Today, Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=-VgIc2eJbIU>, diakses 16 Maret 2015